

Analisis Keberlanjutan Pengembangan Program PPM/Comdev Bidang Ekonomi Pada Pertambangan Batubara Pt.Adaro Indonesia Di Kalimantan Selatan

Analysis of Program Development Sustainability PPM/COMDEV Economics in Coal Mining PT. Adaro Indonesia in South Kalimantan

Murjani

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai
murjanibjb@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran perusahaan pertambangan pada suatu daerah senantiasa membawa harapan perubahan, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar dan peningkatan perekonomian daerah. Demikian halnya dengan kehadiran PT. Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan. Salah satu wujud kepedulian dan tanggung jawab dari perusahaan adalah adanya program PPM/Comdev. Agar pengembangan program PPM/Comdev bidang ekonomi pada pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, dapat berjalan baik, maka perlu dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap keberlanjutan program tersebut, sehingga kedepannya dapat dikembangkan dengan lebih baik. Penelitian dilakukan di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Metode analisis yang digunakan adalah metode MDS-RapComdev (Multidimensional scaling-rapid appraisal for community development). Hasil analisis diperoleh bahwa keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi di kedua wilayah kabupaten, menunjukkan tingkat pengelolaan yang relatif berkelanjutan. Kategori tingkat keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Balangan adalah dikategorikan berkelanjutan (57,90%) yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama; a) kelembagaan ekonomi, b) aksesibilitas ekonomi, dan c) tingkat pengangguran. Sedangkan tingkat keberlanjutan pengelolaan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Tabalong juga dikategorikan berkelanjutan (51,86%) yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama; a) nilai tukar petani, b) kemitraan usaha, dan c) kesempatan kerja/peluang berusaha.

Kata Kunci : Keberlanjutan, PPM, ekonomi, batubara, Rap-Comdev

ABSTRACT

The presence of mining companies in an area always brings hope for change, especially with regard to the welfare of the surrounding community and improving the regional economy. Likewise with the presence of PT. Adaro Indonesia in South Kalimantan. One form of concern and responsibility of the company is the PPM/Comdev program. In order for the development of the PPM/Comdev program in the economic field at PT. Adaro Indonesia's coal mining in South Kalimantan, it can run well, it is necessary to evaluate or assess the sustainability of the program, so that in the future it can be developed better. The research was conducted in Balangan Regency and Tabalong Regency. The analytical method used is the MDS-RapComdev (Multidimensional scaling-rapid appraisal for community development) method. The results of the analysis show that the sustainability of the PPM/Comdev program in the economic sector in the two districts shows a relatively sustainable level of management. The category of sustainability level of the PPM/Comdev program in the economic sector in Balangan Regency is categorized as sustainable (57.90%) which is influenced by 3 main factors; a) economic institutions, b) economic accessibility, and c) unemployment rates. Meanwhile, the level of sustainable management of the PPM/Comdev program in the economic sector in Tabalong Regency is also categorized as sustainable (51.86%) which is influenced by 3 main factors; a) farmer exchange rates, b) business partnerships, and c) job opportunities/business opportunities.

Keywords: Sustainability, PPM, economy, coal, Rap-Comdev

Article History	Submitted: Desember, 2021	Approved with minor revision: Desember, 2021
	Accepted: Desember, 2021	Published: Desember, 2021

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu daerah dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumberdaya alam sebagai salah satu faktor produksi sebagai sumber devisa atau pendapatan daerah (Dewanta, 2004). Pola pengelolaan sumberdaya alam di negara berkembang, termasuk Indonesia, hingga saat ini lebih didasarkan pada kepentingan kebutuhan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Nasrullah, 2013). Sumberdaya alam, seperti; hutan, minyak dan gas bumi, batubara dan lainnya, umumnya masih dipahami dalam konteks *economic sense* dan belum dipahami sebagai *ecological sense* dan *sustainabel sense* (Arsyad, 2002).

Kegiatan pertambangan umumnya beroperasi di daerah terpencil dan berhimpitan dengan kegiatan masyarakat setempat (Manik, 2013). Kehadiran perusahaan pertambangan bahkan sejak tahap eksplorasi seringkali menimbulkan harapan yang tinggi, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dalam bentuk penyerapan tenaga kerja maupun ketersediaan fasilitas infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga pada peningkatan perekonomian daerah secara umum (Yunianto, 2009).

Agar keberadaan perusahaan tersebut dapat diterima dengan baik, maka berbagai upaya harus senantiasa dilakukan oleh perusahaan, baik bersifat sukarela (*charity*) maupun bersifat *mandatory* (kewajiban), seperti program PPM/Comdev (*community development*). *Community Development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan budaya yang lebih baik, apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta et al., 2008). Tujuan pelaksanaan *community development* adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan perusahaan (Ramadhan et al., 2016). Selain itu juga bertujuan memberikan nilai tambah pada nilai sosial ekonomi pemerintah daerah dan khususnya masyarakat sekitar, serta

sebagai wahana interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) dengan perusahaan. Demikian halnya pada kegiatan program PPM/Comdev oleh PT.Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, diarahkan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja pertambangan, khususnya pada wilayah ring 1 (42 desa) yang berada di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Agar pengembangan program PPM/Comdev bidang ekonomi pada pertambangan batubara PT.Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap keberlanjutan program tersebut, sehingga kedepannya dapat dikembangkan dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data sekunder dan data primer. Menurut (Yusuf & Daris, 2018) bahwa data merupakan deskripsi atau keterangan sebuah objek yang belum memiliki makna secara utuh, dapat berupa angka (*numeric*), teks (*categoric*), gambar (*image*), suara (*voice*) ataupun lambang (*symbol*). Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan (Nasution, 2009). Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali (Sugiyono, 2015). Kedua jenis data tersebut bersumber dari instansi terkait ataupun dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk jenis data sekunder, sedangkan data primer bersumber dari responden yang merupakan hasil wawancara dan observasi lapangan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan

tertentu (Arikunto, 2010). Metode yang digunakan sangat bergantung pada jenis dan sumber datanya. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang dikembangkan dalam penelitian ini, meliputi; 1) metode studi pustaka (*desk study*), 2) metode survei (wawancara) dan 3) metode observasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik atau metode pengolahan data menjadi sebuah informasi yang dapat memberikan hasil terhadap permasalahan yang dikaji. Menurut (Sugiyono, 2018) analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis MDS-RAPCOMDEV (*Multidimensional*

Scaling-Rapid Appraisal for Community Development).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Keberlanjutan Program Comdev Bidang Ekonomi

Status keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi, adalah evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan program *community development* khususnya terkait bidang ekonomi, seperti kegiatan usaha, *income* masyarakat hingga kelembagaan ekonomi yang ada dan terbentuk. Keberlanjutan program PPM/Comdev tersebut diestimasi/dinilai berdasarkan 12 (dua belas) atribut yang merupakan parameter yang memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan program PPM/Comdev tersebut. Berikut adalah hasil analisis tingkat keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi oleh PT.Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan.

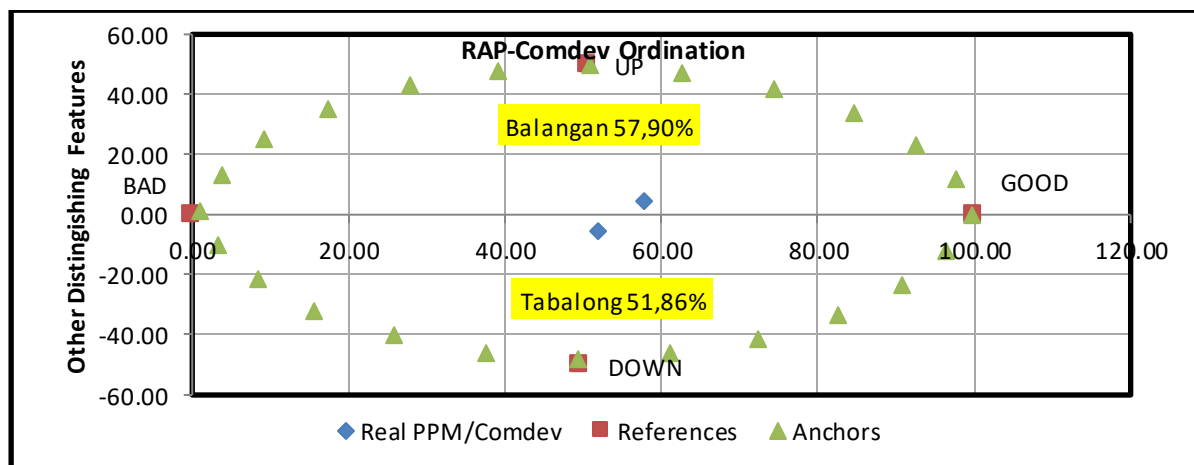


Figure 1: Tingkat keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi

Hasil analisis Rap-Comdev diperoleh bahwa keberlanjutan program PPP/Comdev bidang ekonomi di kedua wilayah kabupaten, menunjukkan tingkat pengelolaan yang relatif baik (berkelanjutan). Kategori tingkat keberlanjutan program PPM/comdev bidang ekonomi di Kabupaten Balangan adalah dikategorikan berkelanjutan dengan nilai indeks 57,90%. Hal ini sesuai dengan (Pitcher & Priekshot, 2001) bahwa dikategorikan berlanjut ketika nilai indeksnya $>50\%$ dan apabila kurang $<50\%$,

maka dikategorikan kurang/tidak berlanjut. Kondisi yang sama juga terjadi pada pelaksanaan program PPM/Comdev di Kabupaten Tabalong, dimana diperoleh nilai indeks keberlanjutan adalah 51,86% atau dikategorikan berkelanjutan. Nilai keberlanjutan tersebut dianggap cukup valid dengan nilai stress 15,11% dan nilai R-Square 94,60%. Selain itu, tingkat validitas model juga diperoleh dari selisih nilai keberlanjutan (ordinasi) dengan nilai monte carlo yang nilainya $<5,0\%$. Hal ini sesuai

dengan (Kavanagh & Pitcher, 2004) bahwa nilai selisih antar nilai indeks keberlanjutan dengan nilai indeks monte carlo adalah maksimum 5%.

Hasil analisis evaluasi keberlanjutan tingkat pengelolaan dan pelaksanaan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Balangan, menunjukkan kondisi (status) yang lebih baik dibandingkan dengan

pengelolaan (pelaksanaan) program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Tabalong. Hal tersebut tampak dari nilai keberlanjutan pengelolaan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Balangan yang relative lebih tinggi. Berikut rincian tingkat validasi analisis Rap-Comdev program PPM/Comdev bidang ekonomi oleh PT.Adaro Indonesia Kalimantan Selatan.

Tabel 1. Validasi model berdasarkan nilai Monter Carlo

No	Uni Analisis	Indeks		Diff	Validitas
		Nilai Keberlanjutan	Nilai Monte Carlo		
1	Kab.Balangan	57,90%	57,03%	2,61%	Valid
2	Kab.Tabalong	51,86%	53,63%	0,18%	Valid

Atribut Pengungkit Keberlanjutan Program PPM/Comdev

Tingkat keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi pada kedua wilayah (Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong), dipengaruhi oleh atribut pengungkit yang berbeda-beda. Berikut adalah hasil analisis *leverage*

attribute (atribut pengungkit) untuk setiap unit analisis yang didasarkan pada wilayah kabupaten pelaksana atau penerima program PPM/Comdev PT.Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan.

Tabel 2. Atribut pengungkit keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi

Unit Analisis	Atribut Pengungkit	Nilai RMS
Kab.Balangan	Aksesibilitas ekonomi	4,94
	Kelembagaan ekonomi	5,02
	Tingkat Pengangguran	4,66
Kab.Tabalong	Nilai Tukar petani	2,29
	Kemitraan Usaha	1,88
	Kesempatan kerja/Peluang berusaha	1,30

Hasil analisis menunjukkan tingkat berkelanjutan pengembangan program PPM/Comdev dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yakni; kelembagaan ekonomi (5,02), aksesibilitas ekonomi (4,94), dan tingkat pengangguran (4,66). Kontribusi setiap atribut terhadap keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten balangan dirinci sebagai berikut:

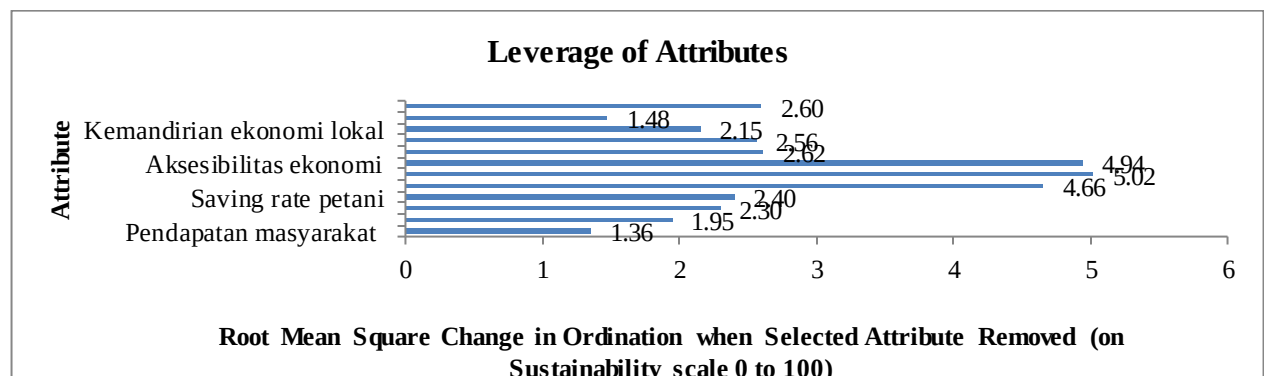


Figure 2: Atribut pengungkit keberlanjutan program PPM/Comdev di Kabupaten Balangan

Faktor kelembagaan ekonomi merupakan unsur terpenting dari pencapaian kemajuan ekonomi di suatu wilayah/daerah. Sistem kelembagaan ekonomi yang baik dapat menjadi *guiders* sekaligus penopang (basis) terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut (Coase, 2008) bahwa kelembagaan ekonomi memiliki kontribusi yang penting dalam pembangunan ekonomi mengingat adanya kegagalan pasar sebagai akibat mahalannya informasi dan pelaku pasar tidak menggunakan semua informasi yang diperoleh atau tidak mampu diperoleh. Lebih jauh (Chang, 2011; Hodgson, 1998) menyebutkan bahwa ketidaksempurnaan informasi dan keterbatasan kapasitas untuk mengelolah informasi akan mempengaruhi biaya transaksi yang mendasari pembentukan kelembagaan. Menurut (Williamson, 2000) bahwa biaya transaksi muncul akibat mahalannya dan asimetris. Lebih jauh menurut (Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez, 2011) bahwa biaya (*cost*) yang timbul bukan hanya untuk menjamin terjadinya transaksi, melainkan juga biaya monitoring dan penegakan keadilan ekonomi. Sedang menurut (Wahyuningsih, 2007) pelaku ekonomi yang menguasai informasi dapat dengan mudah merenggut keuntungan karena kelembagaan merupakan modal sosial yang sebagaimana faktor produksi lainnya, seperti; modal (*capital*), tenaga kerja, lahan dan teknologi ikut menentukan output atau kesejahteraan dari suatu wilayah.

Menurut (Henisz, 2000) bahwa kelembagaan dapat didefinisikan dan diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk pada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Kedua, bila berkaitan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antarpelakunya. Lebih jauh (Acemoglu, 2008) bahwa kelembagaan ekonomi yang baik dicirikan oleh tiga hal. Pertama, pemaksaan terhadap hak kepemilikan (*enforcement of property right*).

Adanya hak kepemilikan di dalam masyarakat akan memberi insentif bagi individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, misalnya investasi, perdagangan dan lain-lain. Kedua, membatasi tindakan-tindakan para elit, politisi dan kelompok – kelompok berpengaruh lainnya yang berupaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa prosedur yang benar, seperti perilaku mencari rente (*rent seeking behavior*). Ketiga, memberi kesempatan yang sama (*equal opportunity*) bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas ekonomi/investasi, khususnya dalam meningkatkan kapasitas individu (*human capital*), maupun berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif lainnya. Secara lebih eksplisit (Acemoglu & Robinson, 2001) menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan sumber penting yang menentukan suatu Negara/bangs gagal atau maju perekonomiannya. Lebih jauh (Acemoglu & Robinson, 2005) bahwa Negara yang kelembagaannya mapan atau inklusif (*inclusive economic institutions*) maka cenderung kinerja ekonominya bagus. Negara tersebut ditandai oleh adanya kelembagaan hak kepemilikan private yang aman, sistem hukum yang tidak bias, dan penyediaan layanan publik yang luas.

Menurut (Schout & North, 1991) bahwa dalam jangka panjang kelembagaan tidak berhenti hanya menjadi fasilitator bagi pencapaian investasi dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), namun tugas penting dari kelembagaan adalah antara lain; (1) menciptakan pasar yaitu kelembagaan yang melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak, (2) mengatur pasar (*market regulating*) yaitu kelembagaan yang bertugas mengatasi kegagalan pasar yakni kelembagaan yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi (misalnya: lembaga – lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi dan jasa-jasa keuangan), (3) menjaga stabilitas yaitu kelembagaan yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, meminimumkan

ketidakpastian makroekonomi dan mengendalikan krisis keuangan (misalnya: bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter dan fiskal), dan (4) melegitimasi pasar yaitu kelembagaan yang memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termaksud mengatur distribusi dan mengelola konflik (misalnya: sistem pensiun, asuransi pengangguran dan dana-dana sosial lainnya).

Aksesibilitas ekonomi dimaknai sebagai suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan dalam berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya kelembagaan/fasilitas ekonomi tersebut dicapai melalui atau diakses (Curtis, 2008). Sedangkan secara umum aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dari sebuah sistem (Magribi et al., 2018). Akses yang baik dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill et al., 2012). Dengan demikian, aksesibilitas ekonomi yang baik, akan menjadikan suatu wilayah dapat tumbuh dengan baik. Untuk itu, keterbukaan akses terhadap ekonomi menjadi salah satu kunci kemajuan wilayah tersebut. Menurut (Rustiadi, 2011) bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi. Lebih jauh menurut (Budianta, 2010) bahwa pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain

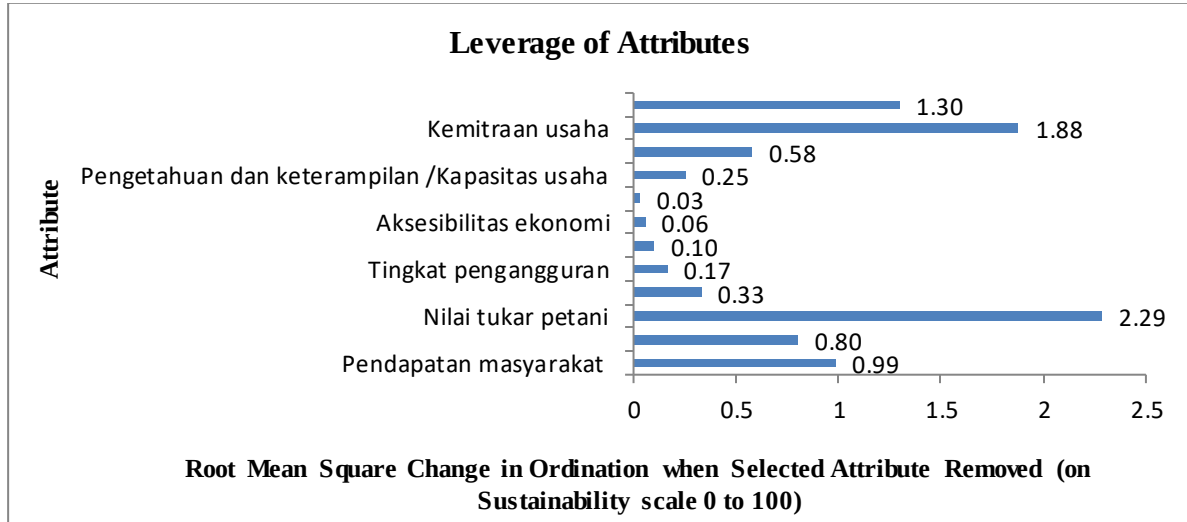
ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong adalah 3,71% pada tahun 2019. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan adalah 5,2%. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong.

Tingkat pengangguran adalah gambaran persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan (*jobless*). Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya produk nasional bruto (PNB, GNP) dan pendapatan per kapita suatu negara. Menurut (Kusuma, 2013) bahwa di negara-negara berkembang seperti; Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong adalah sekitar 3,09 tahun 2019 atau sekitar 4.387 jiwa yang digolongkan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Balangan pada tahun yang sama adalah 5,34% atau sebanyak 1.549 jiwa. Meskipun secara jumlah menunjukkan angka yang relatif sedikit dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong, namun dari sisi persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Balangan jauh lebih tinggi bila

dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong.

Tingkat keberlanjutan pengelolaan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yakni; nilai tukar petani (2,29),

kemitraan usaha (1,88) dan kesempatan kerja/peluang berusaha (1,30). Kontribusi setiap atribut terhadap keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Tabalong dirinci sebagai berikut:



Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase (Rachmat, 2013). Lebih jauh (Keumala & Zainuddin, 2018) menyebutkan bahwa nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani dapat bervariasi di setiap daerah dan berfluktuasi seiring waktu. Nilai tukar petani dihitung secara skala nasional maupun lokal. Dengan kondisi yang digambarkan di Kabupaten Tabalong bahwa salah satu faktor pengungkit pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dari program Comdev adalah nilai tukar petani. Faktor nilai tukar petani menunjukkan bahwa $NTP \leq 100$ dari NTP Tahun Dasar, yang berarti bahwa pada suatu periode tertentu sama/kurang dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas/defisit. Secara ekonomi hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan/penurunan harga produksinya sama atau lebih rendah dibandingkan dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Kondisi lain juga menggambarkan bahwa pendapatan petani sama atau lebih rendah dari pengeluarannya (Syekh, 2013).

Kemitraan usaha dimaknai sebagai jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat usaha tersebut. Lebih jauh (Hafsah, 2002) bahwa kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Menurut (Lantu et al., 2016) bahwa kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil. Program kemitraan usaha menjadi sangat penting dikembangkan terutama sinergitas dalam program CSR (Dipta, 2008). Umumnya kemitraan usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Tabalong melalui program CSR adalah kelompok

usaha kecil dan menengah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT.Adaro Indonesia Kalimantan Selatan melalui program Adaro Spectapreneur 2.0 yang telah dimulai sejak tahun 2018 dan 2019. Program tersebut bertujuan membentuk dan membina seribu pengusaha.

Kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Menurut (Saragih, 2017) kesempatan kerja dapat pula diartikan sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja atau dapat juga dikatakan ketersediaan lapangan kerja untuk yang memerlukan pekerjaan. Sedangkan peluang berusaha adalah keadaan yang menggambarkan kesempatan berusaha/usaha bagi masyarakat di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (Alfianto, 2012). Peluang berusaha juga dimaknai sebagai kesempatan atau peluang yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, harta) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Ketersediaan lapangan kerja dan peluang berusaha akan menurunkan jumlah angka pengangguran di suatu dan disisi lain akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menumbuhkan perekonomian wilayah tersebut. Kemitraan usaha yang dilakukan PT.Adaro Indonesia Kalimantan Selatan, juga membuka peluang berusaha. Selain keberadaan perusahaan membawa dampak positif terhadap masyarakat disekitarnya secara langsung, yakni salah satunya adalah terbukanya lapangan pekerjaan.

KESIMPULAN

Tingkat keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi di kedua wilayah kabupaten, menunjukkan tingkat pengelolaan yang relatif baik (berkelanjutan). Kategori tingkat keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Balangan adalah dikategorikan berkelanjutan (57,90%) tingkat keberlanjutan pengelolaan program PPM/Comdev bidang

ekonomi di Kabupaten Tabalong adalah dikategorikan berkelanjutan (51,86%).

Keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Balangan dipengaruhi oleh 3 faktor; a) kelembagaan ekonomi, b) aksesibilitas ekonomi, dan c) tingkat pengangguran. Sedangkan tingkat keberlanjutan program PPM/Comdev bidang ekonomi di Kabupaten Tabalong juga dipengaruhi oleh 3 faktor; a) nilai tukar petani, b) kemitraan usaha, dan c) kesempatan kerja/peluang berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, E. A. (2012). Kewirausahaan : Sebuah Kajian engabdian Keada Masyarakat. *Heritage*.
- Arikunto. (2010). Metodologi Penelitian. *Pendekatan Penelitian*.
- Arsyad, L. (2002). *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal SMARTek*.
- Budimanta, A., Prasetijo, A., & Rudito, B. (2008). Corporate social responsibility : jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini. In *Corporate social responsibility: jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini*.
- Chang, H. J. (2011). Institutions and economic development: Theory, policy and history. *Journal of Institutional Economics*.<https://doi.org/10.1017/S1744137410000378>
- Coase, R. H. (2008). The Institutional Structure of Production. In *Handbook of New Institutional Economics*. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69305-5_3
- Curtis, C. (2008). Planning for sustainable

- accessibility: The implementation challenge. *Transport Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.003>
- Dewanta, A. S. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. *Unisia*. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.is53.art12>
- Dipta, I. W. (2008). Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan Pola CSR. *INFOKOP*.
- Gómez-Baggethun, E., & Ruiz-Pérez, M. (2011). Economic valuation and the commodification of ecosystem services. *Progress in Physical Geography*. <https://doi.org/10.1177/0309133311421708>
- Hafsah, M. J. (2002). Kemitraan Usaha. *Pustaka Sinar Harapan*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Henisz, W. J. (2000). The institutional environment for economic growth. *Economics and Politics*. <https://doi.org/10.1111/1468-0343.00066>
- Hill, H., Khan, M. E., & Zhuang, J. (2012). Diagnosing the Indonesian economy: Toward inclusive and green growth. In *Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth*. <https://doi.org/10.7135/UPO9781843313786>
- Hodgson, G. M. (1998). The Approach of Institutional Economics. *Journal of Economic Literature*.
- Kavanagh, P., & Pitcher, T. J. (2004). Implementing Microsoft Excel Software For Rapfish: A Technique for The Rapid Appraisal of Fisheries Status. *Fisheries Centre Research Reports*.
- Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2108>
- Kusuma, H. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif*.
- Lantu, D. C., Triady, M. S., Utami, A. F., & Ghazali, A. (2016). Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model. *Jurnal Manajemen Teknologi*. <https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.1.6>
- Magribi, L. O. M., Ngii, E., Rahman, A., Syukriyanto, Z. Z. Z., & Arsyad, L. O. M. N. (2018). Priority district road handling model with power curves approach method. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Manik, J. D. N. (2013). Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia. *Promine*.
- Nasrullah, R. (2013). Pembangunan daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*.
- Nasution, S. (2009). Metode Research (Penelitian Ilmiah. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Pitcher, T. J., & Priekshot, D. (2001). RAPFISH: a rapid appraisal technique to evaluate the substantiality status of fisheries. *Fisheries Research*.
- Rachmat, M. (2013). Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. <https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.111-122>
- Ramadhan, D. T., Budimanta, A., &

- Soelarno, S. W. (2016). RESOLUSI Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan*.<https://doi.org/10.14710/jil.12.2.92-104>
- Kulon Progo. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*.
- Yusuf, M., & Daris, L. (2018). *Teori & Aplikasi dalam Bidang Perikanan* (Issue 1).
- Rustiadi, E. (2011). Paradigma Baru Pembangunan Wilayah di Era Otonomi Daerah. *Lokakarya Otonomi Daerah*.
- Saragih, R. (2017). Membangun USAha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Kewirausahaan*.
- Schout, A., & North, D. C. (1991). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. *The Economic Journal*.<https://doi.org/10.2307/223491>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods). In *International Journal of Physiology*.
- Syekh, S. (2013). Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi di Provinsi Jambi. *Jurnal Bina Praja*.
<https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.253-260>
- Wahyuningsih, S. (2007). Pengembangan Agribisnis Ditinjau Dari Kelembagaan. *Journal Pengembangan Agribisnis*.
- Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. *Journal of Economic Literature*.<https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>
- Yunianto, B. (2009). Kajian Permasalahan Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Rencana Pertambangan Dan Pengolahan Pasir Besi Di Pantai Selatan